

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU  
PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN MALANG  
(Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang

Sebagai Salah Satu Prasyarat Untuk Mendapatkan

Gelar Sarjana Ilmu Hukum



Oleh

**LALU RIZANDY PUTRA PAZZA**

**201610110311199**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PELAKU  
PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN MALANG  
(Studi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang)**

Diajukan Kepada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang  
Sebagai Salah Satu Prasyarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Ilmu Hukum



Oleh  
**LALU RIZANDY PUTRA PAZZA**  
**201610110311199**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2020**

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU  
PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN MALANG**

Diajukan Oleh:

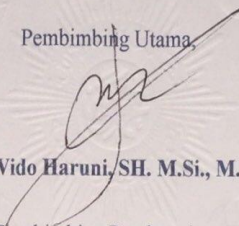
**LALU RIZANDY PUTRA PAZZA**

201610110311199

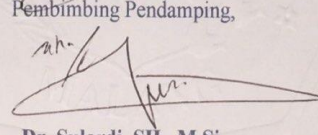
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 Juli 2020

Pembimbing Utama,

  
**Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum**

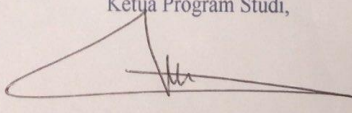
Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Sulardi, SH., M.Si.**

  
**Dr. Fongat, SH., M.Hum**



Ketua Program Studi,

  
**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**LALU RIZANDY PUTRA PAZZA**

201610110311199

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 Juli 2020

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

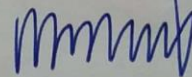
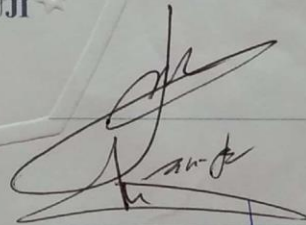
## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sulardi, SH., M.Si.

Penguji I : Dr. Haris, SH. M.Hum

Penguji II : Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H.





## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LALU RIZANDY PUTRA PAZZA

NIM : 201610110311199

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKU  
PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



g, 03 September 2020

**LALU RIZANDY PUTRA PAZZA**

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah : 5)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang orang yang kufur”

(QS Yusuf : 87)



## **ABSTRAKSI**

**Nama : Lalu Rizandy Putra Pazza**  
**NIM : 201610110311199**  
**Judul : PENERAPAN SANKSI ADMINITRATIF BAGI PELAKU  
PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN MALANG**  
**Pembimbing: Catur Wido Haruni, SH., M. Hum**  
**Dr. Sulardi, SH., M.Si**

Penulisan ilmiah ini membahas bagaimana penerapan sanksi adminitratif bagi pelaku pencemaran air di Kabupaten Malang. Dalam penulisan ini tertulis mengangkat dua pembahasan, yang pertama terkait penerapan sanksi adminitratif dan yang kedua faktor penghambat dalam penerapan sanksi adminitratif bagi pelaku pencemaran air di wilayah Kabupaten Malang. Untuk menjawab pembahasan tersebut peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, jenis data kualitatif serta analisa secara deskriptif dan dilakukan dengan metode wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penerapan sanksi adminitratif di wilayah Kabupaten Malang dalam penindakan pelaku pencemaran air ada beberapa kasus pencemaran air yang dinilai kurang efektif dalam pengenaan sanksi adminitratif. Mayoritas pemberian sanksi adminitratif kepada pelaku pencemaran air lebih ditekan kan teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Hambatan dalam pengenaan sanksi adminitratif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang adalah kurangnya sumber daya manusia menjadi faktor utama serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran air. Untuk itu seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha dari tahun ke tahun alangkah baiknya dalam pemberian dan penetapan sanksi adminitrasi lebih di tekankan lagi kepada dampak limbah yang di keluarkan dan disesuaikan dengan peraturan terkait, mengingat pertumbuhan pelaku usaha semakin banyak dan pesat.

**Kata Kunci : sanksi adminitratif, pencemaran air.**

## **ABSTRACT**

**Nama : Lalu Rizandy Putra Pazza**

**NIM : 201610110311199**

**Judul : PENERAPAN SANKSI ADMINITRATIF BAGI PELAKU  
PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN MALANG**

**Pembimbing: Catur Wido Haruni, SH., M. Hum**

**Dr. Sulardi, SH., M.Si**

This scientific writing discusses how the application of administrative sanctions for perpetrators of water pollution in Malang Regency. In this paper, it is written to raise two discussions, the first related to the application of administrative sanctions and the second is the inhibiting factor in the application of administrative sanctions for water pollution perpetrators in Malang Regency. To answer this discussion the researchers in this study used a sociological juridical method, qualitative data types and descriptive analysis and conducted with the interview method. The results of research and discussion indicate that the application of administrative sanctions in the Malang Regency in the action of perpetrators of water pollution there are several cases of water pollution that are considered less effective in the imposition of administrative sanctions. The majority of administrative sanctions imposed on perpetrators of water pollution are more emphasized by written warnings and government coercion. Obstacles in the imposition of administrative sanctions by the Malang Regency Environmental Agency are the lack of human resources being the main factor and the lack of public awareness in the management and control of water pollution. For that, along with the increasing business activity from year to year, it would be better in the administration and determination of administrative sanctions to emphasize more on the impact of waste that is issued and adjusted to related regulations, bearing in mind the growing and rapid growth of business actors.

**Keywords : administrative sanctions, water pollution.**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat dan hidayahnya, sholawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya diakhirat nanti serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di Wilayah Hukum Kota Batu)*" yang dapat terselesaikan pada waktu yang cepat serta tepat dengan sesuai rencana yang telah ditentukan.

Dengan segalanya mengenai kekurangan serta kerendahan hati, penulis menyadari bahwa selama pengerjaan tugas akhir penelitian ini jauh dengan kata sempurna oleh karena itu penulis membutuhkan sebuah koreksi yang bersifat membangun untuk meraih gelar studi sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan untuk mengejar mimpi yang di cita-citakan oleh penulis. Untuk menyempurnakan penelitian ini terdapat banyak pihak yang ikut turut dalam memberikan sebuah bantuan ataupun dorongan kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu di lembaga yang dipimpinnya.
2. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Catur Wido Haruni, SH., M. Hum selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis si sel-sela kesibukannya sehingga terselesaikan skripsi ini

4. Bapak Dr. Sulardi, SH., M.Si selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan sabar kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini
5. Bapak Nu'man Aunuh, SH selaku dosen wali dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah banyak memberikan ilmunya selama perkuliahan.
6. Terimakasih kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah banyak membantu dan memudahkan penulis untuk melengkapi syarat-syarat administrasi.
7. Ibu ku tercinta Tutik Prihatiningsih yang selama ini mendukung dan mensupport saya hingga di titik ini. Selalu membantu dan mendoakan baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Salalu mendoakan di setiap langkah saya.
8. Terima kasih Nina Isti A yang selalu mensupport saya dan selalu membantu dalam pengerjaan observasi dan penelitian skripsi ini di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.
9. Kawan-kawan Kelas D angkatan tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah saya anggap sebagai saudara saya di perkuliahan ini untuk memberikan semangat.
10. Terima kasih untuk teman-teman perkumpulan saya “anak baik” yang juga selalu mensupport penuh selalu menemani saya dalam keadaan susah maupun senang

Penulisan tugas akhir ini sudah layak diujikan untuk penulis mendapatkan gelar Srata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis untuk perbaikan kedepannya. Semoga penulisan tugas akhir ini bisa memberikan manfaat bagi pembangunan hukum kedepannya.

Malang, 03 Juli 2020

## DAFTAR ISI

LEMBAR COVER .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
SURAT PENYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penulisan.....	6
D.1. Manfaat Penulisan.....	6
D.2. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penulisan.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Lokasi Penelitian.....	8
3. Jenis Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	11
F. Rencana Sistematika Penulisan.....	11
1. BAB I PENDAHULUAN.....	11
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	12
4. BAB IV PENUTUP .....	12

BAB II.....	13
TUNJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Sanksi.....	13
1. Pengertian Sanksi.....	13
B. Pencemaran Air.....	23
1. Pengertian Pencemaran Air.....	23
2. Sumber Pencemaran Air .....	25
3. Komponen Pencemaran Air .....	26
4. Dampak Pencemaran Air .....	27
5. Pengendalian Pencemaran Air .....	29
6. Pengaturan Pencemaran Air.....	30
7. Perizinan Lingkungan .....	32
BAB III .....	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Lokasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.....	35
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.....	35
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	35
4. Struktur Organisasi .....	37
B. Penerapan sanksi administrasi dan penegakan hukum bagi pelaku pencemaran air di Kabupaten Malang.....	38
1. Pemberian sanksi Administratif dari Pengelolaan data Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Malang.....	38
2. Prosedur Penerapan Sanksi Administratif .....	66
3. Format Keputusan Sanksi Administratif .....	74
C. Faktor Penghambat dalam Penerapan Sanksi Admnitratif di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang .....	80
BAB IV .....	85
KESIMPULAN DAN SARAN.....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN.....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	43
Tabel 2.....	50
Tabel 3.....	56
Tabel 4.....	67





## DAFTAR BAGAN

Daftar Bagan .....	36
--------------------	----



**SURAT PERNYATAAN PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Lalu Rizandy Putra Pazza

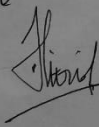
Nim : 201610110311199

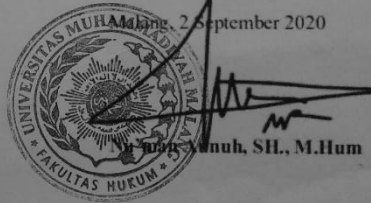
Dengan Judul Skripsi PENCEMARAN SANKSI ADMINITRATIF TERHADAP PELAKU PENCEMARAN AIR DIKABUPATEN MALANG (STUDI KASUS DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 2 September 2020

3/20  
9  




## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Andi, Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonius, Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arsyad. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.
- Muhammad, Akib. 2016. *Hukum Lingkungan dan Prespektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Philipus, M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia*. Cet. Ke-10. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Raynaldo Sembiring. 2017. *Buku Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indonesian Center of Environmental Law (ICEL).
- Raynaldo, Sembiring, Mrgaretha Quina, Shafira Anindia Alif Hexagraha. 2018. *Panduan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Pengaduan Tentang Pelanggaran Pencemaran Air*. Jakarta: Indonesian Center of Environmental Law (ICEL).
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Samsul, Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Satjipto, Rahardjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Sukadana, Husein. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal :**

- Aniek, Masrevaniah. 2009. *Pencemaran dan Parameter Dampaknya*. (Malang: PPSUB).
- Dhoni, Yusra. 2006. *Kebijakan Penentuan Kualitas Air Serta Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Air dan Tanggungjawab Negara Mengantisipasi Pencemaran Air*. Lex Jurnalica. Vol.4. No.1.
- Muhammad, Akib. 2014. *Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: dari Mekanistik Reduksionis ke Holistic-Ekologi*. Jurnal MMH. Vol. 43. No. 1.
- Otto, Sumarwoto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Siti, Sundari Rangkuti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Edisi Kedua. Surabaya: Airlangga University Press.
- Spelt dan JBJM Ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. (penyuting: Philipus M. Hadjon). Surabaya: Fakultas Hukum Unair.
- Sri, Nur Hari Susanto. 2019. *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*. Jurnal Adminitrasi Pemerintahan. Vol. 2. Issue. 1.
- Zairin, Harahap. 2004. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Hukum. Vol. 11. No. 27.

### **Website/Situs:**

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air. Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu. [Kehutanan@bappenas.go.id](mailto:Kehutanan@bappenas.go.id).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. [Lh.malangkab.go.id](http://Lh.malangkab.go.id).

### **Undang-Undang:**

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Kualitas Air

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013, tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

